

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2018

PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA



**PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL
PALANGKA RAYA KELAS I A**

Jalan P. Diponegoro Nomor 21 Kode Pos 73111
Palangka Raya - Kalimantan Tengah
Telepon / Fax (0536) 3221940
Website : www.pn-pangkaraya.go.id
Email : pnpalangkaraya1@gmail.com

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2018

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut :

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/ Rp.
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama tepat waktu	820 perkara	563.953.000 (DIPA 03)
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	100%					
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	20%					

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK) - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	70%					
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%					
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%					
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase petikan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama tepat waktu	820 perkara	563.953.000 (DIPA 03)
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%					
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%					
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	80%					
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	5 perkara	563.953.000 (DIPA 03)
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%					
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%				Layanan Pos Bantuan Hukum	

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama tepat waktu	1 perkara	563.953.000 (DIPA 03)
5.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif	85%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Perkantoran	12 LAYANAN	11.108.069.000 (DIPA 01)
		b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian	85%					
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	45%					
		d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter obyektif	85%					
6.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80%	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Layanan internal	12 LAYANAN	11.108.069.000 (DIPA 01)
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85%					
		c. Ikut mendukung terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%					
		d. Persentase hasil monev dan hasil <i>review</i> yang dijadikan <i>feedback</i> untuk analisa kebijakan	75%					

		e. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	85%						
--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

Palangka Raya, Januari 2018

Pihak Pertama

JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.,MH
NIP. 19610912 198803 1 003